

Inisiatif Terpercaya

Sistem Terpercaya: klaim, verifikasi, dan jaminan

Ringkasan

- Proses klaim, pemantauan, dan verifikasi yang baik dapat membantu memastikan kemampuan sistem Terpercaya untuk memberikan jaminan kepada pembeli dan masyarakat sipil bahwa minyak sawit diproduksi secara berkelanjutan.
- Klaim mengenai aspek keberlanjutan produk harus dipantau dan diverifikasi secara independen.
- Berbagai klaim dapat dibuat dan dipantau berdasarkan informasi yang tersedia melalui sistem Terpercaya dan terdapat beberapa metode verifikasi yang dapat dilakukan.
- Mekanisme penelusuran produk dan verifikasi data, bersama dengan mekanisme pengamanan (*safeguards*) dapat memperkuat sistem Terpercaya dan menghindari kesalahan dalam mengenali kinerja sosial dan lingkungan produsen.

Pengantar

Pendekatan yurisdiksi berpotensi menawarkan cara untuk mendapatkan berbagai komoditas secara berkelanjutan dari wilayah geografis yang luas, dengan biaya lebih rendah dan upaya yang lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan terkait skema sertifikasi produk (Essen dan Lambin, 2021; Seymour dkk., 2020). Namun, pelaksanaan pendekatan ini masih menghadapi tantangan, diantaranya karena standar untuk keberlanjutan yurisdiksi belum selesai dirumuskan. Selain itu, sebagian besar model untuk mendapatkan komoditas (*sourcing*) berbasis yurisdiksi hanya berfokus pada satu yurisdiksi, alih-alih keseluruhan atau beberapa yurisdiksi sebagai bagian dari sistem yang memungkinkan evaluasi dan diferensiasi di tingkat nasional.

Terpercaya adalah sistem keberlanjutan tingkat nasional dengan pendekatan yurisdiksi yang diampu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). BAPPENAS memantau dan mengevaluasi kinerja kabupaten di Indonesia menurut 22 indikator keberlanjutan (Gambar 1). Melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, indikator-indikator ini dirancang untuk menunjukkan kesesuaian produksi komoditas di suatu kabupaten dengan aspek lingkungan, inklusi, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak pekerja. Semua indikator mencerminkan prinsip dan kriteria skema sertifikasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indikator juga selaras dengan hukum, peraturan, dan kebijakan Indonesia, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia berdasarkan Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim. Dengan demikian, sistem Terpercaya memberikan ruang bagi promosi prinsip-prinsip keberlanjutan yang sah, memiliki dasar hukum, dan disepakati secara luas di tingkat yurisdiksi.

Untuk memberikan jaminan yang efektif bahwa komoditas didapatkan secara berkelanjutan, sistem Terpercaya harus memungkinkan perusahaan untuk membuat klaim yang akurat dan dapat diverifikasi tentang aspek keberlanjutan dari produknya. *Briefing* ini meninjau klaim yang dihasilkan skema sertifikasi keberlanjutan produk dan membahas klaim yurisdiksi yang dapat dihasilkan sistem Terpercaya. Lebih lanjut, *briefing* ini juga mempertimbangkan cara-cara menguatkan sistem Terpercaya agar dapat menjadi sistem jaminan yang kredibel untuk *sourcing* komoditas secara berkelanjutan.

Gambar 1. Indikator Terpercaya. Sumber: Inisiatif Terpercaya



* Standar Indonesian Sustainable Palm Oil dan Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Tujuan Terpercaya sebagai sistem jaminan

Terpercaya berfungsi sebagai sistem yang mengukur kinerja keberlanjutan kabupaten di Indonesia. Saat ini, melalui 22 indikatornya, Terpercaya dapat menunjukkan kinerja suatu kabupaten kepada organisasi masyarakat sipil, pelaku rantai pasok, dan publik. Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan mekanisme untuk memberikan insentif kepada kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja keberlanjutannya dan memastikan kelengkapan data terkait. Terkait dengan *sourcing* komoditas secara berkelanjutan sebagai insentif transisi menuju keberlanjutan, Terpercaya memberikan indikasi keberlanjutan kabupaten kepada pelaku rantai pasok, tetapi tidak memiliki mekanisme untuk memverifikasi klaim keberlanjutan.

Untuk memperkuat *sourcing* yang berkelanjutan sebagai sarana mempromosikan transisi keberlanjutan di tingkat kabupaten, serta produksi dan konsumsi komoditas yang berkelanjutan secara umum, sistem pemantauan kinerja berbasis yurisdiksi nasional seperti Terpercaya harus bertujuan:

- Memberikan jaminan yang kredibel kepada pelaku rantai pasok komoditas tentang keberlanjutan pada tingkat yurisdiksi.
- Meningkatkan pengumpulan dan penyebaran data yang akurat dan diperbarui secara berkala dengan terus menerus.

Klaim dan sistem jaminan

Skema sertifikasi dan pelabelan produk bertujuan meyakinkan konsumen tentang kualitas suatu produk dan proses produksinya. Sebagai contoh adalah Voluntary Partnership Agreement (VPA), bagian dari Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Action Plan dari Uni Eropa, yang menetapkan negara-negara perlu memiliki sistem jaminan legalitas kayu untuk memverifikasi kesesuaian produk kayu dengan hukum nasional. Di Indonesia, SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) menyediakan fungsi ini dan memberikan jaminan legalitas produksi kayu (Wiersum dan Elands, 2013) kepada konsumen. Fungsi ini serupa dengan sertifikasi dan pelabelan keberlanjutan yang memberikan konsumen jaminan bahwa suatu produk, atau bahan pembuatnya, diproduksi dengan ramah lingkungan (Boer, 2003). Untuk itu, diperlukan rantai pasok yang dapat ditelusuri dan transparan hingga ke titik produksi beserta mekanisme verifikasi independen (Mol dan Oosterveer, 2015). Standar keberlanjutan dapat ditegakkan melalui peraturan, terutama jika meliputi aspek legalitas dari suatu komoditas, seperti kayu jenis tertentu dan rantai pasok terkait perikanan. Namun, sebagian besar skema sertifikasi keberlanjutan bersifat sukarela dan berbasis pasar; banyak dari skema ini beserta badan akreditasinya adalah anggota International Social and Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL) (Loconto dan Fouilleux, 2014).

Briefing ini meninjau tiga fitur skema sertifikasi keberlanjutan berikut: jaminan, klaim dan verifikasi (Tabel 1). Secara singkat, sistem sertifikasi dirancang untuk memberikan *jaminan* tentang produk kepada pelanggan. *Klaim* adalah pernyataan terkait produksi, sedangkan *verifikasi* adalah sarana yang memberikan bukti objektif tentang keakuratan klaim.

Tabel 1. Terminologi dan contoh

Terminologi	Definisi dan referensi	Contoh ¹
Jaminan	Bukti konkret yang menunjukkan terpenuhinya persyaratan tertentu terkait produk, proses, sistem, orang, atau badan.	“Sertifikasi RSPO merupakan jaminan kepada pelanggan bahwa standar produksi minyak sawit adalah berkelanjutan.”
Klaim	Klaim adalah pernyataan untuk membedakan dan mempromosikan produk berkelanjutan berdasarkan satu atau lebih pilar keberlanjutan: sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Klaim ini dapat ditunjukkan melalui kombinasi logo, klaim tertulis, dan akses ke informasi lebih lanjut.	Dalam rantai pasok RSPO yang menerapkan model pelestarian identitas (<i>identity preservation</i>) dan model segregasi, klaim berikut dapat dibuat: “Produk kelapa sawit yang terkandung dalam produk ini telah disertifikasi sebagai produk yang berasal dari sumber RSPO.” Jika minyak sawit disertifikasi dengan model neraca massa, klaim seperti berikut dapat dibuat: “Volume [produk kelapa sawit] / [minyak sawit] / [minyak inti sawit] di dalam produk ini mencerminkan volume setara minyak sawit atau minyak inti sawit yang diproduksi oleh pabrik dan perkebunan bersertifikasi RSPO.”
Verifikasi	Mengonfirmasi, dengan memberikan bukti objektif, bahwa persyaratan telah dipenuhi. Verifikasi memastikan integritas dari landasan suatu klaim.	Dalam sistem sertifikasi, verifikasi dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi, melalui audit berkala.

¹ Contoh kutipan diambil dari <https://www.rspo.org/certification>

Sebagian besar sistem sertifikasi dan jaminan keberlanjutan yang ada berfokus pada produsen individu dan rantai pasok komoditas. Untuk memperluas cakupan ini, ISEAL dan WWF telah mengusulkan model jaminan keberlanjutan lanskap dan yurisdiksi (Tabel 2). Keduanya juga telah memberikan contoh jenis klaim yang dapat dibuat dan cara verifikasi (Tabel 3; ISEAL, 2020; WWF dan ISEAL, 2019). ISEAL dan WWF mengategorikan klaim menurut (i) struktur yurisdiksi, (ii) kinerja yurisdiksi, dan (iii) klaim tindakan pendukung, dan memberikan detail tentang klaim spesifik yang dapat dibuat di setiap kategori. Dua kategori pertama terkait dengan sistem Terpercaya, khususnya dengan pengaturan tata kelolanya (termasuk kebijakan dan peraturan khusus untuk inisiatif yurisdiksi) dan dengan pengukuran kinerja keberlanjutan kabupaten. Kategori ketiga berkaitan dengan klaim yang dapat dibuat oleh perusahaan untuk mendukung inisiatif yurisdiksi—sebuah isu yang belum ditelaah di dalam sistem Terpercaya.

Tabel 2. Elemen lanskap yang kredibel dan sistem jaminan keberlanjutan yurisdiksi.
Sumber: Diadaptasi dari WWF dan ISEAL (2019, hal. 2)

Elemen	Penjelasan
Konsistensi:	Terdapat metodologi pemantauan dan verifikasi yang dapat diakses publik, dan kerangka pelaporan yang diterapkan secara konsisten dalam inisiatif lanskap.
Kompetensi	Analisis data, penilai, dan personel jaminan lainnya memiliki kualifikasi dan pelatihan yang sesuai, mengikuti evaluasi kompetensi, dan mempertahankan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pemutakhiran kompetensi secara berkelanjutan.
Ketidakterpencilkan	Pengawasan independen terhadap proses pemantauan menciptakan sistem <i>checks and balances</i> . Proses pemantauan itu sendiri tidak hanya bergantung pada penilaian mandiri atau penyediaan data yang belum diverifikasi, tetapi juga digabungkan dengan verifikasi pihak kedua atau ketiga.
Peningkatan	Inisiatif lanskap mengumpulkan data berkualitas tentang kinerjanya dan memiliki sistem manajemen data yang cukup kuat untuk menyaring informasi yang dapat digunakan oleh para pelaku lanskap untuk meningkatkan kinerja mereka serta oleh inisiatif itu sendiri untuk meningkatkan efektivitasnya.
Transparansi	Ada kejelasan tentang apa yang sedang dievaluasi, dan data pemantauan serta metodologi di baliknya tersedia dan dapat diakses.
Efisiensi	Proses pemantauan disederhanakan agar berfokus pada pengukuran kemajuan pada isu-isu yang terpenting. Intensitas dan frekuensi verifikasi ditentukan berdasarkan profil risiko masalah dan lanskap.

Tabel 3. ISEAL dan klaim keberlanjutan yurisdiksi. Sumber: Diadaptasi dari IPCC, 2020

	Jenis klaim	Cara-cara Verifikasi
YURISDIKSI	Klaim terkait proses: “Kami sedang merumuskan inisiatif yurisdiksi yang akan membantu menyelaraskan praktik kami.”	Tinjauan dokumentasi dari inisiatif yurisdiksi atau bukti implementasi lainnya.
	Klaim terkait hasil: “Kami telah membentuk landasan bagi inisiatif yurisdiksi yang efektif.”	Dokumen-dokumen terkait harus mudah dan dapat diakses publik atau ditinjau secara formal. Pencapaian hasil dapat dinilai melalui kerangka implementasi lanskap dan yurisdiksi yang telah ditetapkan.
	Klaim terkait manajemen risiko: “Kami memiliki proses untuk mengelola kategori risiko keberlanjutan tertentu.”	Terdapat informasi <i>timeline</i> dan tahap-tahap kunci dalam proses (<i>milestone</i>); terdapat bukti pencapaian suatu <i>milestone</i> secara tepat waktu.
KINERJA YURISDIKSI	Klaim terkait status: Klaim jenis ini mengomunikasikan tingkat kinerja terkait suatu topik, misalnya: “Kami telah mencapai deforestasi <i>net zero</i> .”	Verifikasi kinerja menilai integritas data dan cara data diproses untuk pelaporan. Keluasan dan keketatan verifikasi akan bergantung pada, antara lain, jenis dan ambisi klaim yang dibuat.
	Klaim terkait tren: Klaim ini mengomunikasikan perubahan kinerja, sering kali terhadap garis dasar atau sebagai kemajuan menuju target, misalnya: “Kami telah menurunkan laju deforestasi hingga separuh dalam lima tahun.”	Verifikasi pada dasarnya membangun kepercayaan terhadap keandalan dan keakuratan data. Secara paling sederhana, kepercayaan dapat dibangun berdasarkan siapa yang mengumpulkan dan menganalisis data, dan bagaimana caranya.
	Klaim nilai subjektif: Klaim deskriptif ini berusaha mencerminkan kinerja di berbagai masalah atau indikator keberlanjutan, misalnya: “Kami telah meningkatkan kinerja lingkungan selama lima tahun berturut-turut.”	Intensitas dan tingkat independensi verifikasi akan bergantung pada seberapa jauh jaminan yang diperlukan oleh khalayak target ('pengguna') agar dapat memercayai klaim yurisdiksi.
KLAIM TINDAKAN PENDUKUNG	Klaim terkait keterlibatan: “Kami berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi inisiatif yurisdiksi.”	Verifikasi terhadap tindakan pendukung utamanya bertujuan menentukan apakah, atau sejauh mana, tindakan yang diusulkan telah dilakukan atau komitmen telah dibuat.
	Klaim terkait kontribusi: “Kami mengambil tindakan ini sejalan dengan encana aksi dan hasil keberlanjutan dari inisiatif yurisdiksi.”	Verifikasi akan bergantung pada kontribusi inisiatif yurisdiksi, seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan untuk inisiatif yurisdiksi • Tindakan di yurisdiksi • Tindakan untuk meningkatkan produksi • Rantai pasok
	Klaim terkait atribusi: “Tindakan kami menghasilkan atau berkontribusi pada hasil keberlanjutan tertentu di yurisdiksi.”	

Usulan untuk sistem Terpercaya

Sistem Terpercaya harus memungkinkan pembeli untuk membuat klaim khusus tentang keberlanjutan suatu komoditas (terutama minyak sawit) yang bersumber dari yurisdiksi tertentu—sepanjang rantai pasok dapat ditelusuri. Sistem ini juga harus memungkinkan aktor lain, seperti organisasi masyarakat sipil, untuk memverifikasi klaim secara transparan. Terakhir, sistem Terpercaya harus memungkinkan Pemerintah (baik kementerian teknis maupun pemerintah daerah) untuk secara akurat, teratur, dan transparan menyediakan informasi yang menjadi dasar klaim tersebut.



▲
Buah kelapa sawit

Foto: Icaro Cooke
Vieira, CIFOR

Klaim yang memerlukan definisi ambang batas (*threshold*), atau pemeringkatan kabupaten, mungkin memerlukan kesepakatan di antara pemangku kepentingan dan pelaku rantai pasok, yang berpotensi meliputi sektor swasta, masyarakat sipil, dan badan pemerintah. Ambang batas juga dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang, peraturan, dan/atau komitmen di tingkat nasional atau internasional, atau persyaratan di pasar tertentu.

Sebagai contoh, di bawah sistem Terpercaya, dapat dibuat klaim berikut terkait daerah produksi:

- Komoditas yang bersumber dari wilayah ini diproduksi dengan:
 - memenuhi ambang batas minimum dari empat pilar keberlanjutan: lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola; dan/atau.
 - praktik/kinerja yang unggul pada satu–atau serangkaian–indikator yang ditentukan oleh pembeli, yang mencerminkan kebijakan perusahaan atau standar yang dikomunikasikan; dan/atau.
 - lebih baik dibandingkan wilayah lain, atau berada di antara kelompok wilayah terbaik di suatu negara, berdasarkan satu atau lebih indikator.

Namun, karena sistem Terpercaya bekerja di tingkat yurisdiksi, saat ini Terpercaya tidak dapat memberikan data – atau membuat klaim – tentang kinerja di tingkat perusahaan, koperasi, atau petani kecil. Selain itu, Terpercaya belum memiliki mekanisme untuk verifikasi independen terhadap data indikator.

Klaim berikut dapat dibuat tentang Terpercaya sebagai sistem jaminan keberlanjutan:

- Terpercaya secara transparan menyediakan data pemerintah berdasarkan empat pilar keberlanjutan untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
- Data indikator Terpercaya dikumpulkan setiap tahun oleh otoritas yang ditugaskan dan lembaga teknis sesuai dengan praktik pemerintah.
- Pengecekan dan penyimpanan data indikator Terpercaya yang dikumpulkan merupakan prioritas pemerintah sebelum data dipublikasikan.

Mengatasi celah di dalam sistem Terpercaya

Sebagai salah satu dari sedikit sistem pemantauan yurisdiksi nasional untuk produksi komoditas yang berkelanjutan, Terpercaya dapat memberikan kontribusi yang berbeda dari sistem lainnya. Agar berjalan efektif, diperlukan mekanisme tambahan atau modifikasi sebagai berikut:

- Penambahan ketertelusuran dan informasi lacak balak
- Verifikasi independen
- Kepatuhan dan *safeguards*

Ketertelusuran dan informasi lacak balak

Kompleksitas rantai pasok minyak sawit menimbulkan tantangan dalam menelusuri komoditas kembali ke yurisdiksi produksinya menggunakan data yang tersedia untuk publik. Di samping informasi tentang asal komoditas, klaim yang kredibel tentang keberlanjutan dan inklusivitas produksi komoditas juga membutuhkan sistem ketertelusuran yang dapat diverifikasi dan dapat diakses. Sistem ketertelusuran seperti ini dapat dibentuk dan diperkuat melalui kerangka peraturan untuk memastikan lacak balak yang dapat diverifikasi.

Verifikasi independen

Untuk menjamin kredibilitas sistem Terpercaya kepada pengguna, mekanisme untuk memverifikasi data indikator harus dibuat. Proses verifikasi dapat bersifat berkala (misalnya tahunan atau dua tahunan) atau *ad hoc*; metode pengambilan sampel dapat dikembangkan untuk memastikan efisiensi. Untuk memastikan kredibilitas, badan verifikasi pihak ketiga harus diidentifikasi. Selain itu, perlu mekanisme agar organisasi masyarakat sipil dan peneliti dapat turut meninjau dan menyarankan perbaikan desain dan pengoperasian sistem. Selain itu, pembiayaan verifikasi harus diidentifikasi untuk memastikan bahwa proses verifikasi yang kredibel dapat didukung.

Kepatuhan dan *safeguards*

Skala dan desain sistem Terpercaya mengandung risiko salah mengaitkan kinerja keberlanjutan, baik secara positif maupun negatif, dengan produsen individu di suatu kabupaten. Misalnya, di kabupaten yang berkinerja buruk, mungkin terdapat produsen, pabrik kelapa sawit, atau petani kecil yang mempertahankan standar sosial dan lingkungan yang tinggi. Mereka berisiko mengalami sanksi yang tidak adil, seperti penghapusan dari daftar yurisdiksi berkelanjutan yang disetujui dengan akibat hilangnya akses ke pasar. Sebaliknya, sebuah perusahaan yang berlokasi di kabupaten berkinerja baik, tetapi tidak mematuhi standar lingkungan dan sosial, dapat menerima apresiasi yang keliru.

Mengingat risiko tersebut, agar standar dapat dipertahankan dan kemajuan di tingkat kabupaten dapat didorong, Terpercaya dapat memfasilitasi pelaporan entitas berkinerja buruk di kabupaten yang berkinerja baik serta mengidentifikasi produsen yang disertifikasi dengan standar kredibel namun berlokasi di daerah yang buruk. Terpercaya juga dapat mempertimbangkan untuk mengecualikan kabupaten yang menunjukkan akuntabilitas dan mengambil langkah-langkah perbaikan sehingga kemajuan dapat dipertahankan. Selain itu, kabupaten dapat membuat daftar produsen, petani kecil, pabrik, dan kilang, kemudian belajar membedakan antara entitas yang berkinerja baik dengan entitas yang telah melanggar standar lingkungan dan sosial.

Kesimpulan dan rekomendasi

Sistem Terpercaya berpotensi menjadi sistem jaminan keberlanjutan berskala besar bagi pembeli komoditas Indonesia. Klaim yang dapat dibuat pembeli melalui sistem Terpercaya perlu diperluas dan diverifikasi. Tak hanya mendefinisikan, menggalang konsensus, dan meningkatkan kesadaran tentang ambang batas keberlanjutan, mengembangkan kapasitas sistem Terpercaya pun harus dilakukan agar sistem dapat menyediakan informasi tentang ketertelusuran dan memastikan lacak balak yang dapat diverifikasi. Selain itu, perlu dibuat mekanisme verifikasi independen dan memastikan kepatuhan.



▲
**Pekebun kecil
berperan penting
dalam mewujudkan
keberlanjutan di
sektor minyak
kelapa sawit**

Foto: Inobu

References

- Boer, J. de, 2003. Sustainability labelling schemes: the logic of their claims and their functions for stakeholders. *Bus. Strategy Environ.* 12, 254–264. <https://doi.org/10.1002/bse.362>
- Essen, M. von, Lambin, E.F., 2021. Jurisdictional approaches to sustainable resource use. *Front. Ecol. Environ.* n/a. <https://doi.org/10.1002/fee.2299>
- ISEAL, 2020. Making Credible Jurisdictional Claims: ISEAL Good Practice Guide. ISEAL Alliance, London.
- ISEAL, 2018. Assuring Compliance with Social and Environmental Standards: ISEAL Code of Good Practice (No. Version 2). ISEAL Alliance, London.
- Loconto, A., Fouilleux, E., 2014. Politics of private regulation: ISEAL and the shaping of transnational sustainability governance. *Regul. Gov.* 8, 166–185. <https://doi.org/10.1111/rego.12028>
- Mol, A.P.J., Oosterveer, P., 2015. Certification of Markets, Markets of Certificates: Tracing Sustainability in Global Agro-Food Value Chains. *Sustainability* 7, 12258–12278. <https://doi.org/10.3390/su70912258>
- Seymour, F.J., Aurora, L., Arif, J., 2020. The Jurisdictional Approach in Indonesia: Incentives, Actions, and Facilitating Connections. *Front. For. Glob. Change* 3. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.503326>
- Wiersum, K.F., Elands, B.H.M., 2013. Opinions on legality principles considered in the FLEGT/VPA policy in Ghana and Indonesia. *For. Policy Econ., Emerging Forest Regimes* 32, 14–22. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2012.08.004>
- WWF, ISEAL, 2019. Credible assurance at a landscape scale: A discussion paper on landscape and jurisdictional assurance and claims (Discussion Paper). WWF.

Foto sampul: Perkebunan kelapa sawit di Desa Sentabai, Kalimantan Barat. Foto: Nanang Sujana/ CIFOR

Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi info.terpercaya@efi.int

Penafian

Briefing ini dikembangkan oleh Inovasi Bumi (INOBU) dan European Forest Institute (EFI), dengan dukungan dari EU REDD Facility. Isi *briefing* ini adalah tanggung jawab penulis dan tidak dapat dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

November 2021.

